

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Selain itu kemiskinan juga disebabkan karena banyaknya penduduk yang mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, sanitasi, pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga BBM, tarif dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.

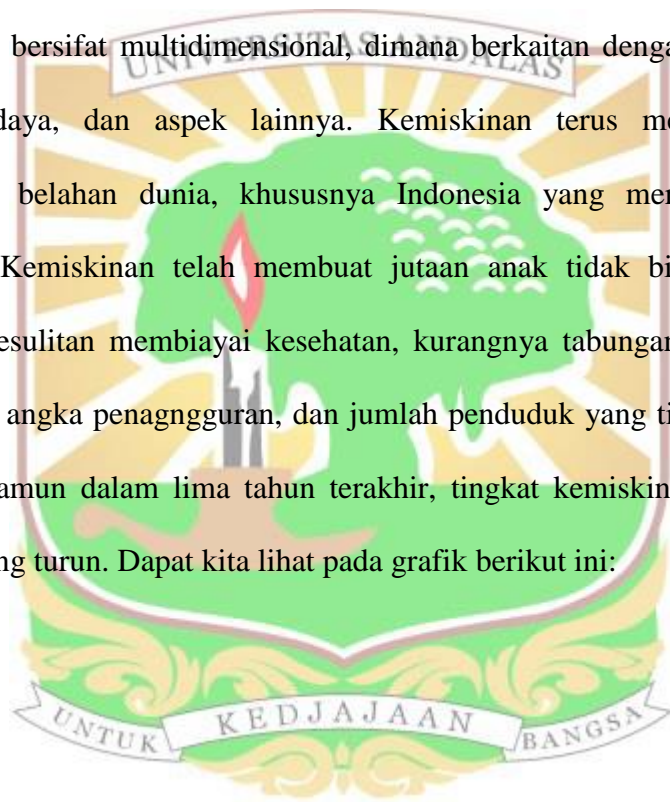
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan (Suparlan, 1995). kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Indikasi dari kemiskinan dapat dilihat dari kenyataan seperti ketidaktersediaannya air bersih, gizi buruk, rendahnya pendidikan, banyaknya pengangguran dan lain-lain. Permasalahan kemiskinan di berbagai negara, khususnya negara sedang berkembang, telah menarik perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan berkomitmen menghapus kemiskinan melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program tersebut dijabarkan ke dalam 17 *point* pokok yang ingin dicapai pada tahun 2030, yaitu meliputi (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10) Mengurangi Kesenjangan, (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas, (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, (13) Aksi Terhadap Iklim, (15) Kehidupan di Darat, (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Sutopo, 2014).

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Sudah lebih dari

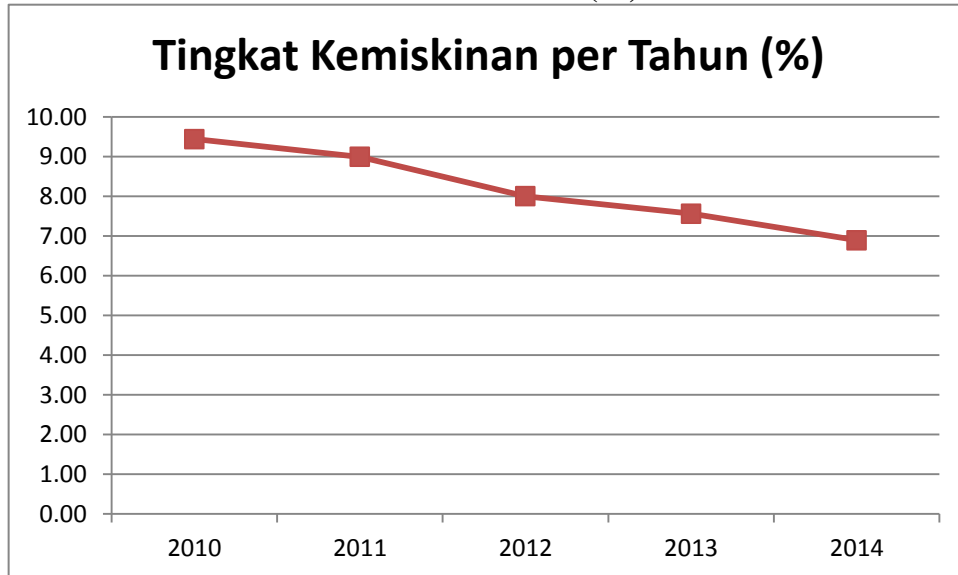
setengah abad Indonesia dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan negara lain Indonesia masih jauh dari harapan kemakmuran dan kesejahteraan. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, dahulunya pada awal kemerdekaannya tahun 1965 Singapura memiliki masalah yang kompleks. Namun pada masa sekarang ini Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. Berbeda dengan Indonesia setelah berjalannya waktu perekonomian Indonesia masih berada pada negara berkembang. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, meningkatnya angka pengangguran, dan jumlah penduduk yang tidak terbendung jumlahnya. Namun dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung turun. Dapat kita lihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 1.1**

**Perkembangan Penduduk Miskin di Sumatera Barat**

**Tahun 2010-2014 (%)**



*Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, data diolah*

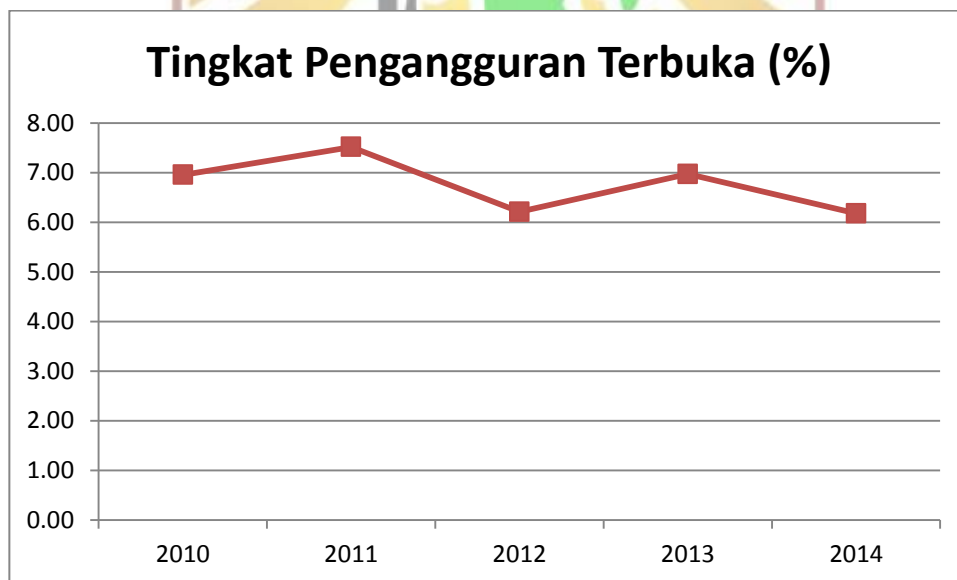
Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010-2014 terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat adalah 9,44% kemudian di tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,99%. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan lagi mencapai 8%, selanjutnya pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 7,56% dan tahun berikutnya mengalami penurunan lagi yaitu 6,89 % pada tahun 2014.

Umumnya penyebab kemiskinan berasal dari sifat malas masyarakat untuk berusaha dan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat kesejahteraan di kabupaten/kota di Sumatera Barat masih belum merata dan tergolong tinggi. Terdapat enam kabupaten yang tergolong tingkat kemiskinan cukup tinggi yaitu, kepulauan Mentawai, kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan,

kabupaten Pasaman, kabupaten solok, dan kabupaten Padang Pariaman. Keenam kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan diatas 9%. Dari keseluruhan kabupaten kota di Sumatera Barat, kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki angka tertinggi kemiskinan dengan 14,96%.

Selain itu faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Jika dilihat semakin berlangsungnya waktu kesempatan kerja bagi tenaga kerja berkurang. Sempitnya kesempatan kerja menyebabkan semakin bertambahnya angka pengangguran. Sehingga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Dalam lima tahun terakhir dapat kita lihat tingkat pengangguran terbuka dalam gambar berikut ini:

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat**  
**Tahun 2010-2014 (%)**



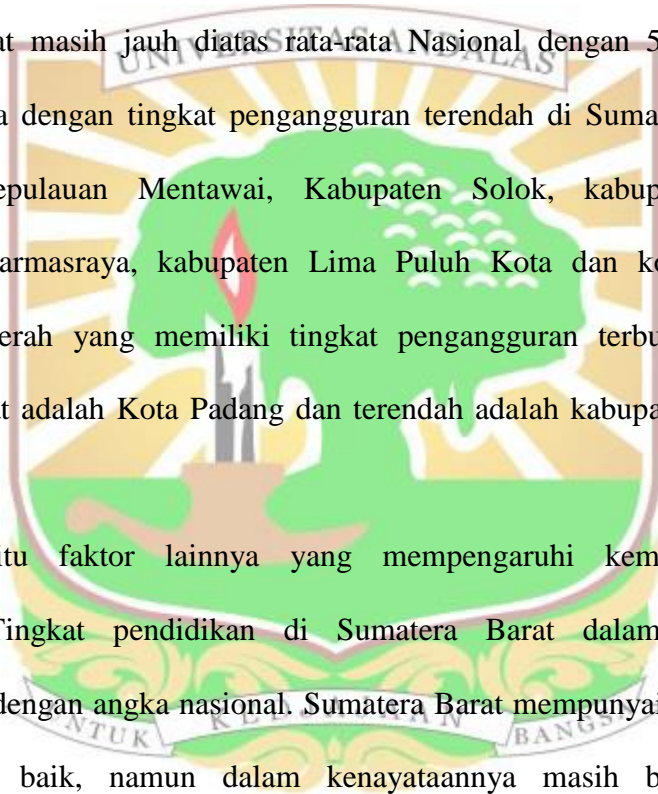
Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, data diolah

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010-2014 terlihat adanya fluktuasi tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Pada tahun 2010 pengangguran Sumatera Barat mencapai 6,95% kemudian di tahun 2011

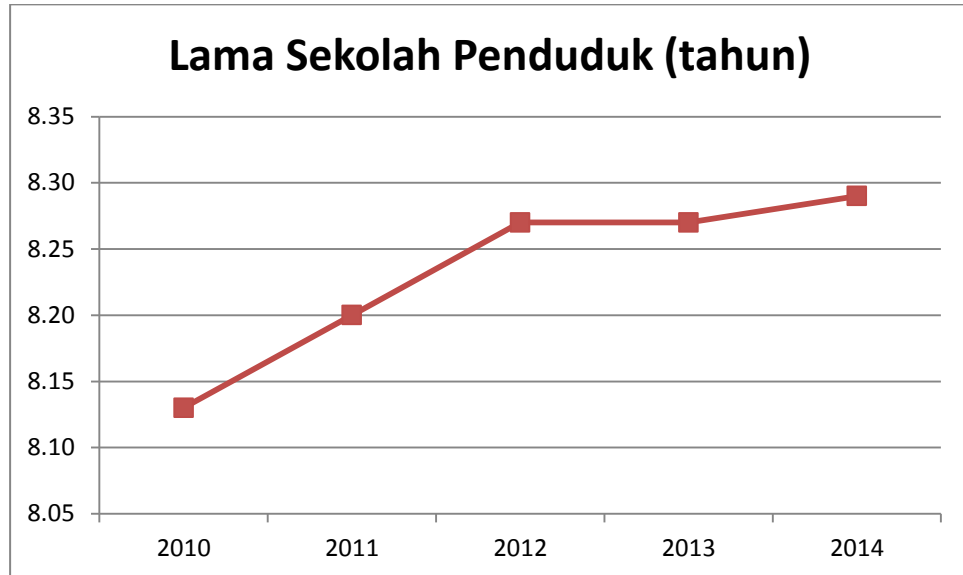
mengalami peningkatan yaitu 7,52%. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat mengalami penurunan yaitu 6,21%, namun pada tahun 2013 pengangguran terbuka di Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan yaitu 6,97% dan tahun berikutnya mengalami penurunan lagi dan hanya mencapai 6,18% di tahun 2014.

Angka ini menenpatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi ke 9 dimana tingkat pengangguran terbuka Sumatera Barat masih jauh diatas rata-rata Nasional dengan 5,92%. Terdapat kabupaten kota dengan tingkat pengangguran terendah di Sumatera Barat yaitu kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, kabupaten Pasaman, kabupaten Dharmasraya, kabupaten Lima Puluh Kota dan kota Bukittinggi. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang dan terendah adalah kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan di Sumatera Barat dalam kondisi baik dibandingkan dengan angka nasional. Sumatera Barat mempunyai angka rata-rata lama sekolah baik, namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat kemiskinan di Sumatera Barat. Berikut ini adalah gambaran lama sekolah penduduk Sumatera Barat lima tahun terakhir:



**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Lama Sekolah Penduduk di Sumatera Barat**  
**Tahun 2010-2014 (tahun)**



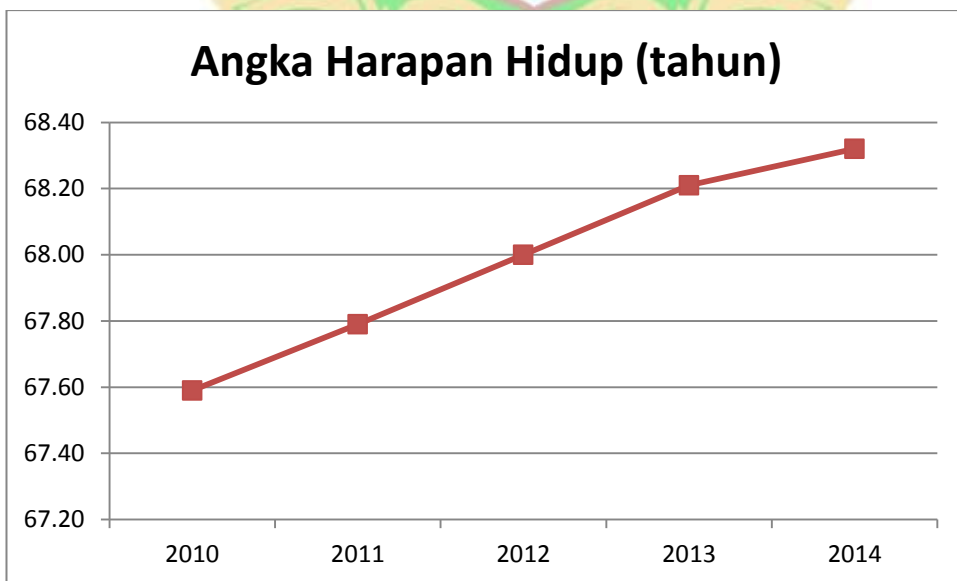
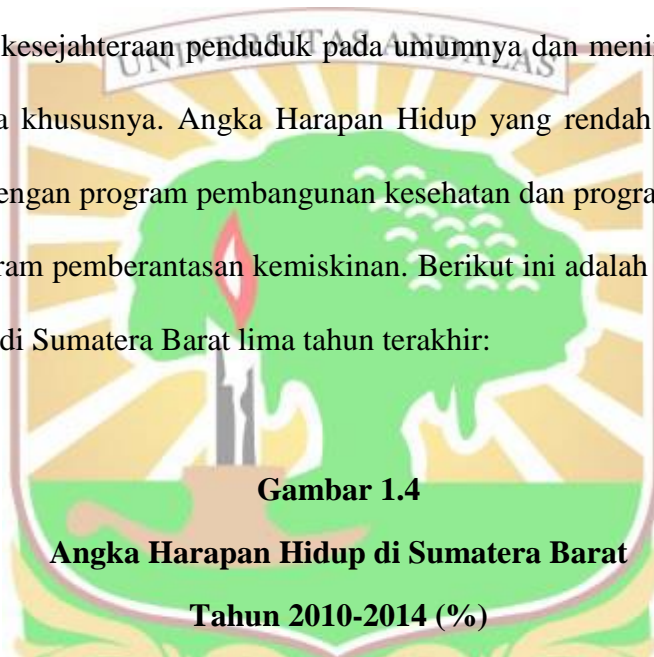
*Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, data diolah*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010-2014 terlihat adanya peningkatan lama sekolah penduduk di Sumatera Barat. Pada tahun 2010 lama sekolah penduduk Sumatera Barat yaitu 8,13 tahun kemudian di tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu 8,20 tahun. Pada tahun 2012 lama sekolah penduduk di Sumatera Barat mengalami peningkatan lagi mencapai 8,27 tahun. Selanjutnya pada tahun 2013 lama sekolah penduduk Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,27 tahun dan tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi mencapai 8,28 tahun dan tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi mencapai 8,29 tahun di tahun 2014.

Masa atau waktu rentang penduduk dalam bersekolah mempengaruhi kemiskinan. Di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang memiliki lama sekolah lebih dari 10 tahun seperti, kota Padang, kota Padang Panjang, kota Solok, dan kota Bukittinggi. Sementara daerah yang memiliki angka lama sekolah

penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 6,19 tahun.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah angka harapan hidup. Kemiskinan suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program social lainnya termasuk program pemberantasan kemiskinan. Berikut ini adalah gambaran angka harapan hidup di Sumatera Barat lima tahun terakhir:



Sumber: BPS Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, data diolah



Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010-2014 terlihat adanya kecenderungan kenaikan angka harapan hidup di Sumatera Barat. Pada tahun 2010 angka harapan hidup di Sumatera Barat yaitu 67,59 tahun kemudian di tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu 67,79 tahun. Pada tahun 2012 angka harapan hidup Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu 68 tahun, selanjutnya pada tahun 2013 angka harapan hidup di Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan yaitu 68,21 tahun dan tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi mencapai 68,32 tahun di tahun 2014. Di Sumatera Barat angka harapan hidup tertinggi yaitu kota Padang dengan 73,18 tahun sedangkan yang paling terendah yaitu kabupaten kepulauan Mentawai dengan angka harapan Hidup 63,55 tahun.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar dibandingkan dengan negara lain, penduduknya banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. dalam artian pendapatan yang mereka dapatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan akan rumah layak huni, kebutuhan akan makanan yang memenuhi standar gizi, pemenuhan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, pendidikan yang layak dan kebutuhan kesehatan yang layak dan dapat hidup sehat. Pendapatan yang mereka peroleh tidak dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya dapat mereka penuhi, sehingga mereka dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang menjerumuskan pada jurang kemiskinan.

Sumatera Barat dengan luas 42.297,32 km<sup>2</sup> dengan 12 kabupaten dan 7 kota menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setidaknya mengurangi angka kemiskinan Sumatera

Barat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan tingkat kemiskinan penduduk. Efektivitas dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan tingkat kemiskinan. (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar atau solusi dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Deni Tisna, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan. Dimana tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, dan angka harapan hidup merupakan salah satu bagian dari penentu keberhasilan atau tidaknya pengentasan kemiskinan sehingga penulis melakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

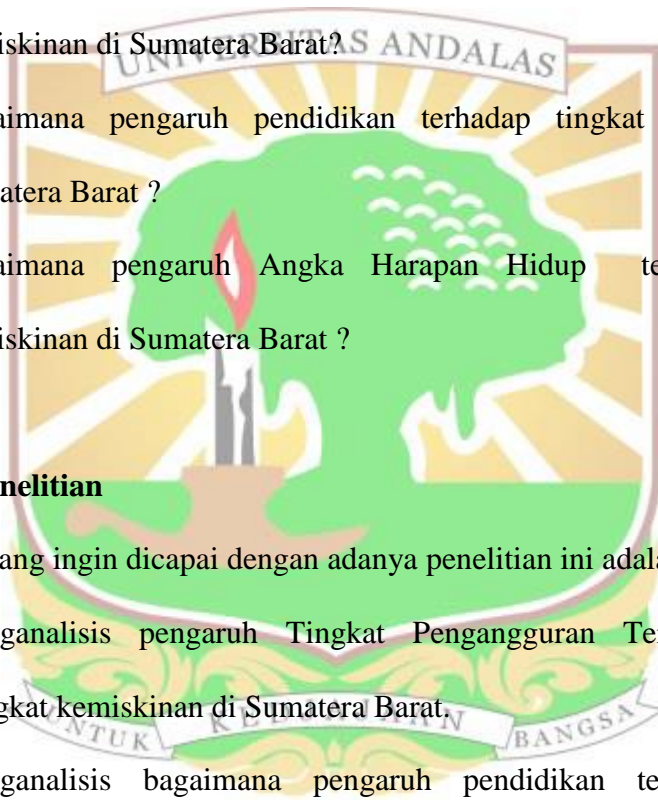
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?
- b. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat ?
- c. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat,
- b. Menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
- c. Menganalisis bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan tambahan wawasan bidang ekonomi, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan.
- b. Masyarakat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka, Pendidikan, dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.
- c. Pemerintah terkait (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan pemerintah yang terutama terkait dengan Tingkat Pengangguran terbuka, Pendidikan, dan Angka Harapan Hidup di Sumatera Barat.

#### 1.5. Ruang lingkup

Penelitian ini akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu ruang lingkup penelitian yaitu waktu penelitian (*time series*) yang digunakan mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan daerah penelitian adalah 19 kabupaten/kota di provinsi sumatera Barat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka, lama sekolah penduduk, dan angka harapan hidup sedangkan untuk variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Mengemukakan konsep dasar teori yang ada kaitannya dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan. Disamping itu juga dijelaskan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta pada akhir bab akan dilakukan pengolahan data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dan analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

## **BAB VI : PENUTUP**

Mengemukakan kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

